

RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
Bab. II Hasil Evaluasi Renja Tahun Sebelumnya	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Rentra	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46
2.3.1 Dinamika Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Nasional	46
2.3.2 Kerentanan Sistem Pangan terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Produksi	48
2.3.3 Produktivitas dan Daya Saing Subsektor Peternakan	48
2.3.4 Risiko Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	49
2.3.5 Disparitas Layanan dan Integrasi Data.....	50
2.3.6.Tantangan Fiskal dan Efektivitas Belanja.....	51
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027	52
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
Bab. III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	74
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	78
3.3.Program dan Kegiatan.....	82

Bab. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	102
Bab. V Penutup.....	104

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025	13
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.....	44
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	55
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Selatan	77
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026	102
Tabel 4.2 Rincian Komponen Belanja Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	118

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis Perangkat Daerah dan menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Penyusunan Renja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**, yang menegaskan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan strategis jangka menengah, perencanaan tahunan, serta penganggaran berbasis kinerja. Dalam kerangka tersebut, Renja berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah dapat diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur, realistis, serta sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Secara substantif, urusan ketahanan pangan dan peternakan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**. Dalam kerangka pembagian urusan

tersebut, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan strategis yang bersifat lintas kabupaten/kota, mencakup fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, serta pengendalian pada skala regional. Dengan demikian, intervensi pembangunan pada Tahun 2026 tidak semata berorientasi pada kegiatan teknis operasional, melainkan diarahkan pada penguatan sistem, harmonisasi kebijakan antar wilayah, serta penciptaan stabilitas pasokan dan harga pangan pada level provinsi.

Dalam konteks ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran kunci dalam menjaga keseimbangan neraca pangan regional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, fasilitasi distribusi antar kabupaten/kota, serta stabilisasi pasokan dan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang memiliki sentra produksi pada beberapa kabupaten sekaligus wilayah dengan tingkat akses pangan yang lebih terbatas menuntut adanya kebijakan redistribusi dan intervensi berbasis kewilayahan. Oleh karena itu, penguatan sistem logistik pangan daerah, pemetaan kerentanan pangan, serta sinkronisasi data *supply-demand* antar wilayah menjadi agenda strategis yang berada dalam domain kewenangan provinsi.

Pada subsektor peternakan, kewenangan provinsi mencakup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) lintas kabupaten/kota, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan antar daerah, serta fasilitasi peningkatan mutu dan keamanan pangan asal hewan. Risiko penyebaran penyakit hewan yang tidak mengenal batas administratif menempatkan Pemerintah Provinsi sebagai aktor utama dalam membangun sistem surveilans terpadu, penguatan laboratorium veteriner, serta koordinasi respons cepat antar wilayah. Dalam perspektif ini, Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan hewan regional guna menjamin keberlanjutan produksi dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dari sisi ekonomi regional, komoditas pangan strategis memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan inflasi, khususnya pada kelompok *volatile food*. Fluktuasi produksi akibat variabilitas iklim, gangguan distribusi, maupun wabah penyakit hewan berpotensi meningkatkan tekanan harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi. Pemerintah Provinsi melalui fungsi koordinatifnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterpaduan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga, termasuk melalui sinergi

dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penguatan cadangan pangan daerah, serta fasilitasi kerja sama antar daerah (KAD) dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan.

Lebih lanjut, pembangunan ketahanan pangan daerah tidak hanya difokuskan pada aspek kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH), penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan asal hewan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang holistik. Dalam hal ini, peran provinsi menjadi strategis dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota agar intervensi yang dilakukan memiliki standar, arah kebijakan, dan indikator kinerja yang selaras secara regional.

Memperhatikan dinamika perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta proyeksi risiko gangguan produksi dan distribusi pada Tahun 2026, diperlukan pendekatan manajemen risiko pangan yang adaptif dan berbasis data. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran sentral dalam membangun sistem informasi pangan dan peternakan yang terintegrasi lintas kabupaten/kota sebagai dasar perumusan kebijakan yang responsif dan akurat. Dengan demikian, Renja Tahun 2026 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen

kebijakan untuk memperkuat tata kelola sistem pangan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mempertegas peran strategis pemerintah provinsi dalam: menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan regional; memperkuat sistem kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan lintas wilayah; meningkatkan produktivitas dan daya saing subsektor peternakan melalui pembinaan dan fasilitasi; serta mengoordinasikan intervensi ketahanan pangan antar kabupaten/kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan semakin tangguh, adaptif terhadap risiko, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan,

serta penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan peternakan.

Landasan hukum dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan pangan dan pertanian/peternakan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemuatakhirannya;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2026. Renja ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjabarkan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur, terarah, serta sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selain itu, Renja dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga setiap alokasi sumber daya dapat dikaitkan secara langsung dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Renja

juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan.

Secara kelembagaan, Renja Tahun 2026 dimaksudkan untuk mempertegas peran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan kewenangan urusan ketahanan pangan dan peternakan yang bersifat lintas kabupaten/kota, khususnya dalam fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pembangunan sistem pangan dan peternakan regional.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam rencana kerja tahunan yang operasional dan terukur;
2. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
3. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan provinsi dalam urusan ketahanan pangan dan peternakan, dengan indikator kinerja dan target yang jelas;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui perencanaan berbasis kinerja dan berbasis kebutuhan (*evidence-based planning*);
5. Memperkuat fungsi koordinasi dan harmonisasi kebijakan ketahanan pangan dan peternakan lintas kabupaten/kota dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan regional;
6. Menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2026 secara terukur dan akuntabel.

Dengan tujuan tersebut, Renja Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen manajerial dan kebijakan yang efektif dalam memperkuat sistem ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan, adaptif terhadap risiko, serta selaras dengan agenda pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Tahun 2026 sebagai

dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya, analisis capaian kinerja perangkat daerah, permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan, serta isu-isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan RKPD Tahun 2026, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta penjabaran indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, lokasi, kelompok sasaran, serta pagu indikatif sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan umum serta penegasan komitmen pelaksanaan Renja Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan sebagai bagian dari siklus pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kontribusinya terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Fisik		Ket.
			Target (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.947.278.200	100	25.709.130.684	95,41	100	100	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.675.000	100	416.991.343	99,36	100	100	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.600.000	100	225.260.995	98,97	100	100	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.575.000	100	58.412.003	99,72	100	100	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.500.000	100	133.318.345	99,86	100	100	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.355.912.000	100	21.203.300.158	94,84	100	100	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.215.912.000	100	21.063.455.658	94,81	100	100	
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.000.000	100	139.844.500	99,89	100	100	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	100	74.764.400	99,69	100	100	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	100	74.764.400	99,69	100	100	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.500.000	100	760.011.782	99,94	100	100	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	112.000.000	100	111.987.850	99,99	100	100	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100	99.968.500	99,97	100	100	
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.500.000	100	116.261.905	99,80	100	100	
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	100	49.940.000	99,88	100	100	
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	100	74.999.621	99,99	100	100	
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	100	6.996.000	99,94	100	100	
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	100	299.857.906	99,95	100	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Fisik		Ket.
			Target (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000	100	166.722.000	98,07	100	100	
14.	Pengadaan Mebel	85.000.000	100	82.084.500	96,57	100	100	
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000	100	84.637.500	99,57	100	100	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.456.337.200	100	2.390.834.080	97,33	100	100	
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	100	17.000.000	100	100	100	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.174.200	100	513.433.080	97,03	100	100	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.910.163.000	100	1.860.401.000	97,39	100	100	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.854.000	100	696.506.921	98,12	100	100	
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.854.000	100	297.526.265	97,92	100	100	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.000.000	100	150.520.000	96,49	100	100	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	100	248.460.656	99,38	100	100	
B	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.814.319.000	100	1.748.346.331	96,36	100	100	
VIII	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	402.774.000	100	383.468.124	95,21	100	100	
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	44.800.000	100	42.097.940	93,97	100	100	
23.	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	236.000.000	100	233.106.679	98,77	100	100	
24.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	121.974.000	100	108.263.505	88,76	100	100	
IX	Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	205.300.000	100	179.687.635	87,52	100	100	
25.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	205.300.000	100	179.687.635	87,52	100	100	
X	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Pertahun sesuai dengan	1.206.245.000	100	1.185.190.572	98,25	100	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Fisik		Ket.
			Target (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
	Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							
26.	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	281.100.000	100	261.869.567	93,16	100	100	
27.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	858.500.000	100	858.411.005	99,99	100	100	
28.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	66.645.000	100	64.910.000	97,40	100	100	
C	Program Penanganan Kerawanan Pangan	456.800.000	100	455.317.660	99,68	100	100	
XI	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	456.800.000	100	455.317.660	99,68	100	100	
29.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	456.800.000	100	455.317.660	99,68	100	100	
D	Program Pengawasan Keamanan Pangan	324.430.000	100	297.618.387	91,74	100	100	
XII	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	324.430.000	100	297.618.387	91,74	100	100	
30.	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	158.117.000	100	134.537.604	85,09	100	100	
31.	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	81.354.000	100	78.605.223	96,62	100	100	
32.	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	84.959.000	100	84.475.560	99,43	100	100	
E	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.811.391.186	100	3.785.126.995	99,31	100	100	
XIII	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	217.700.000	100	217.622.725	99,96	100	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Fisik		Ket.
			Target (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
33.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak ,Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	217.700.000	100	217.622.725	99,96	100	100	
XIV	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	579.750.000	100	575.146.926	99,21	100	100	
34.	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	472.000.000	100	468.310.396	99,22	100	100	
35.	Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan,Pakan	107.750.000	100	106.836.530	99,15	100	100	
XV	Penyediaan /Benih Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.013.941.186	100	2.992.357.344	99,28	100	100	
36.	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.013.941.186	100	2.992.357.344	99,28	100	100	
F	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.247.020.000	100	1.233.779.598	98,94	100	100	
XVI	Penataan Prasarana Pertanian	1.055.450.000	100	1.047.115.596	99,21	100	100	
37.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan	687.050.000	100	683.456.706	99,48	100	100	
38.	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan,Klinik Hewan,Ambulatori,Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri atau Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner Keswan	368.400.000	100	363.658.890	98,71	100	100	
XVII	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak Yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	191.570.000	100	186.664.002	97,44	100	100	
39.	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	191.570.000	100	186.664.002	97,44	100	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Fisik		Ket.
			Target (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
G	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	792.600.000	100	781.410.988	98,59	100	100	
XVIII	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah KABUPATEN/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	270.500.000	100	265.586.354	98,18	100	100	
40.	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	270.500.000	100	265.586.354	98,18	100	100	
XIX	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	395.800.000	100	390.291.278	98,61	100	100	
41.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	395.800.000	100	390.291.278	98,61	100	100	
XX	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	126.300.000	100	125.533.356	99,39	100	100	
42.	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	126.300.000	100	125.533.356	99,39	100	100	
H	Program Penyuluhan Pertanian	5.124.996.800	100	5.020.791.606	97,97	100	100	
XXI	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	4.937.024.300	100	4.836.746.885	97,97	100	100	
43.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4.937.024.300	100	4.836.746.885	97,97	100	100	
XXII	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	187.972.500	100	184.044.721	97,91	100	100	
44.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	187.972.500	100	184.044.721	97,91	100	100	
Jumlah		40.518.835.186	100	39.031.522.249	96,33	100	100	

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, total pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 40.518.835.186,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp 39.031.522.249,-** atau **96,33%**.

Dari sisi pelaksanaan fisik, target kegiatan sebesar 100% dan realisasi fisik tertimbang mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai output yang ditetapkan.

Tingkat serapan anggaran sebesar 96,33% mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran Tahun 2025 telah disusun secara realistis, dengan deviasi anggaran sebesar 3,67% yang masih dalam batas kewajaran pengelolaan keuangan daerah. Selisih tersebut pada umumnya disebabkan oleh efisiensi belanja, optimalisasi harga pengadaan, serta sisa anggaran pada akhir tahun anggaran.

Capaian realisasi fisik 100% menunjukkan konsistensi antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini mencerminkan kapasitas manajerial perangkat daerah dalam pengendalian pelaksanaan program serta efektivitas koordinasi lintas bidang.

Secara kuantitatif, kombinasi antara realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,33% menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Tahun 2025 berada pada kategori **efektif dan efisien**.

Seluruh output kegiatan dapat tercapai tanpa harus menghabiskan 100% pagu anggaran.

Namun demikian, dalam perspektif perencanaan berbasis outcome, tingginya serapan anggaran dan capaian fisik belum secara otomatis mencerminkan optimalisasi dampak terhadap indikator strategis ketahanan pangan dan peternakan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berhenti pada aspek administratif (output delivered), tetapi perlu dikaitkan dengan kontribusi terhadap:

- Stabilitas pasokan dan harga pangan;
- Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- Penguatan cadangan pangan daerah;
- Pengendalian penyakit hewan menular strategis;
- Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Pendekatan ini penting agar perencanaan Tahun 2027 lebih berorientasi pada pencapaian outcome dan dampak pembangunan (*development impact*), bukan sekadar capaian fisik kegiatan.

Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 menjadi indikator penting dalam mengukur progres terhadap target akhir Renstra Perangkat Daerah periode berjalan. Dengan capaian fisik 100% dan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi, secara administratif perangkat daerah berada dalam kondisi ***on track***.

Namun demikian, penilaian capaian Renstra harus dianalisis berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat outcome.

Apabila sampai Tahun 2025 capaian indikator strategis belum mencapai proporsi yang memadai terhadap target akhir Renstra, maka diperlukan akselerasi intervensi pada Tahun 2026 dan 2027, khususnya pada program teknis urusan ketahanan pangan dan peternakan.

Dengan demikian, meskipun kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tergolong sangat baik, fokus perencanaan Tahun 2027 perlu diarahkan pada:

1. Penajaman program teknis yang berdampak langsung terhadap indikator strategis Renstra;
2. Optimalisasi belanja yang berorientasi pada stabilisasi harga dan peningkatan produksi;
3. Penguatan sinergi lintas kabupaten/kota sesuai kewenangan provinsi;
4. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi berbasis data kinerja.

Hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kapasitas pelaksanaan anggaran yang kuat dan sistem pengendalian internal yang efektif. Tantangan ke depan bukan lagi pada aspek serapan anggaran, melainkan pada peningkatan kualitas belanja agar lebih berdampak terhadap indikator makro ketahanan pangan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2027 harus diarahkan pada penguatan belanja produktif, penajaman prioritas intervensi berbasis risiko, serta peningkatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian outcome pembangunan.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	3 Dok	-	-
2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-
2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	-	6 Lap	6 Lap	6 Lap	100%	6 Lap	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	-	-
2.09.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Data	-	-
2.09.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	221 org/bln	115 org/bln	142 org/bln	142 org/bln	100%	221 org/bln	-	-
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 org	10 org	5 org	5 org	100%	20 org	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	-	-
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34 Paket	34 Paket	100%	34 Paket	-	-
2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19 jenis	19 Paket	19 Paket	100%	19 Paket	-	-
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	-	-
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	-	-
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	5 Dok	-	-
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	2 Laporan	145 Laporan	145 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pelaksanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	10 Unit	-	-
2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	-	-
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	3 Unit	3 Unit	100%	10 Unit	-	-
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	-	-
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	-	-
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	100%	33 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	-	-
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	-	-
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	-	-	-	-	-	54%	-	-
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	100%	-	-
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	-	-	-	-	-	8 Unit	-	-
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	94,4	-	-	-	-	94,7	-	-
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	stabilisasi pasokan dan harga pangan								
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	31,5 Ton	-	-
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	12 Ton	12 Ton	100%	31,5 Ton	-	-
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Persentase Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang terlaksana	-	-	-	-	-	100%	-	-
2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1%	1%	1%	1%	100%	1%	-	-
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan								
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	25 Sertifikat	30 Sertifikat	40 Sertifikat	40 Sertifikat	100%	45 Sertifikat	-	-
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian	- Jumlah Produksi Daging	184.684 Ton	167.514 Ton	175.890 Ton	175.890 Ton	100%	193.918 Ton	-	-
		- Jumlah Produksi Telur	274.013 Ton	248.538 Ton	260.965 Ton	260.965 Ton	100%	287.714 Ton		
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu	Persentase Peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi								
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	-	-	-	-	-	10 Orang	-	-
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang terlaksana	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	70 Ekor	500 Ekor	3.000 Ekor	3.000 Ekor	100%	4.000 Ekor	-	-
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Jumlah Produksi Daging	184.684 Ton	167.514 Ton	175.890 Ton	175.890 Ton	100%	193.918 Ton	-	-
		- Jumlah Produksi Telur	274.013 Ton	248.538 Ton	260.965 Ton	260.965 Ton	100%	287.714 Ton		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendukung Pertanian Lainnya	Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya								
3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	17 Laporan	-	-
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	17 Laporan	-	-
3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	-	-	-	-	100 Kasus	-	-
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan	-	-	-	-	-	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang terlaksana								
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	-	-	-	-	-	2 Laporan	-	-
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	-	-	-	-	-	10 Laporan	-	-
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	-	-	-	-	-	10 Laporan	-	-
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	-	-	-	-	-	20 Unit Usaha	-	-
3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	-	-	-	-	-	20 Unit Usaha	-	-
3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	-	-	-	-	-	30 Unit Usaha	-	-
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	-	-	-	-	-	100 Orang	-	-
3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	-	-	-	-	-	2 Produk	-	-
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat	15 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	20 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM								
3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	-	-	-	-	5 Orang	-	-
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Persentase Kesejahteraan Hewan yang terlaksana	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	-	-	-	-	-	2 Kasus	-	-
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	-	-	-	-	-	20 Sertifikasi	-	-
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan yang terlaksana	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.27.06.1.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	-	-	-	-	-	10 Laporan	-	-
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan maju Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2027	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang terlaksana	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	208 Orang	-	-
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	340 Kelompok	208 Orang	324 Kelompok	324 Kelompok	100%	208 Orang	-	-
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.07.1.03.0008	Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendapat pembinaan	-	-	-	-	-	17 Unit	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk menilai tingkat kualitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya dalam urusan pangan serta pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan. Analisis ini tidak hanya melihat capaian output kegiatan, tetapi juga kontribusinya terhadap indikator outcome pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, posisi strategis Pemerintah Provinsi berada pada fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta intervensi lintas kabupaten/kota. Dengan demikian, kinerja pelayanan provinsi diukur dari sejauh mana intervensi kebijakan mampu memperkuat sistem ketahanan pangan regional dan ekosistem peternakan secara terintegrasi.

Pelayanan urusan ketahanan pangan pada level provinsi berfokus pada aspek ketersediaan, stabilitas pasokan dan harga, serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, intervensi provinsi diarahkan pada:

- Fasilitasi distribusi pangan antar wilayah;
- Penguatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- Pengembangan sistem informasi pangan;

- Koordinasi pengendalian inflasi pangan melalui forum TPID;
- Pembinaan kelembagaan distribusi pangan.

Secara kinerja administratif, pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dengan capaian fisik 100% pada Tahun 2025. Namun dalam perspektif pelayanan publik, tantangan utama masih terletak pada:

1. Fluktuasi harga komoditas strategis yang dipengaruhi faktor eksternal;
2. Ketimpangan distribusi antar wilayah;
3. Kerentanan terhadap gangguan pasokan akibat perubahan iklim.

Hal ini menunjukkan bahwa peran provinsi perlu lebih difokuskan pada penguatan sistem stabilisasi regional, bukan hanya pada kegiatan administratif atau pembinaan rutin.

Dalam sub urusan peternakan dan kesehatan hewan, kewenangan provinsi mencakup pengendalian penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota, pengawasan lalu lintas ternak, pengujian laboratorium kesehatan hewan, serta pembinaan usaha peternakan skala menengah dan besar.

Kinerja pelayanan pada aspek ini menunjukkan beberapa capaian positif, antara lain:

- Penguatan sistem surveilans dan respon cepat terhadap potensi wabah;
- Peningkatan cakupan layanan kesehatan hewan;
- Dukungan pembinaan kelompok ternak dan peningkatan kapasitas SDM peternak;
- Pengawasan keamanan pangan asal hewan lintas wilayah.

Meskipun realisasi fisik dan keuangan Tahun 2025 sangat baik, tantangan struktural yang masih dihadapi antara lain:

- Skala usaha ternak rakyat yang relatif kecil dan belum sepenuhnya efisien;
- Ketergantungan terhadap pasokan pakan dan bibit dari luar daerah;
- Risiko Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang bersifat dinamis dan lintas wilayah.

Oleh karena itu, penguatan intervensi provinsi pada Tahun 2027 perlu diarahkan pada pengendalian risiko dan peningkatan produktivitas, bukan hanya pada aspek fasilitasi administratif.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Tahun 2025, terdapat beberapa kesenjangan pelayanan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan Tahun 2027, yaitu:

1. Kesenjangan antara capaian output kegiatan dengan dampak terhadap stabilitas harga pangan;
2. Kesenjangan akses layanan kesehatan hewan antar wilayah;

3. Keterbatasan integrasi data pangan dan peternakan sebagai dasar pengambilan keputusan;
4. Keterbatasan intervensi langsung provinsi akibat pembagian kewenangan yang lebih dominan pada kabupaten/kota untuk produksi primer.

Dengan demikian, pendekatan perencanaan Tahun 2027 harus lebih menekankan pada fungsi orkestrasi kebijakan regional (regional policy orchestration), di mana provinsi berperan sebagai penguat sistem dan penyeimbang antar wilayah.

Analisis kinerja pelayanan menunjukkan bahwa secara administratif perangkat daerah telah berkinerja sangat baik, namun peningkatan kualitas pelayanan substantif masih memerlukan penguatan pada:

- Intervensi stabilisasi harga berbasis data real time;
- Penguatan cadangan pangan sebagai instrumen pengendali risiko;
- Modernisasi sistem kesehatan hewan dan laboratorium;
- Integrasi sistem informasi pangan dan peternakan tingkat provinsi;
- Pendekatan manajemen risiko terhadap ancaman perubahan iklim dan wabah penyakit hewan.

Dengan mempertimbangkan capaian Tahun 2025 dan tantangan struktural yang ada, Renja Tahun 2027 harus disusun

dengan orientasi pada peningkatan outcome dan daya ungkit kebijakan provinsi terhadap sistem ketahanan pangan dan peternakan secara regional.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	77,52	79,79	82,08	84,38	79,31	-	-	-	-
2.	Prevalensi Ketidak cukupan pangan (PoU)	-	-	5,75	5,36	4,88	4,40	5,94	-	-	-	-
3.	Skor Pola Pangan Harapan	-	-	94,1	94,4	94,7	95,0	95,1	-	-	-	-
4.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	-	-	50%	52%	54%	56%	12,9%	-	-	-	-
5.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	-	1%	1%	1%	1%	0,07%	-	-	-	-
6.	Ketersediaan Energi dan Protein	-	-	2400/ 63	2400/ 63	2400/ 63	2400/ 63	2127,8/ 60	-	-	-	-
7.	Persentase Pangan Segar Memenuhi	-	-	100%	100%	100%	100%	95,82%	-	-	-	-

	Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan											
8.	Jumlah Produksi Daging	-	-	175.890	184.684	193.198	203.614	173.566	-	-	-	-
9.	Jumlah Produksi Telur	-	-	260.965	274.013	287.714	302.099	253.631	-	-	-	-
10.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
11.	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
12.	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025, proyeksi Tahun 2026, dinamika makro ekonomi daerah, risiko sektoral, serta analisis pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi memiliki posisi sebagai pengampu urusan pemerintahan konkuren pada skala regional, dengan fungsi utama koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta intervensi lintas kabupaten/kota.

Isu strategis berikut tidak hanya mencerminkan permasalahan aktual, tetapi juga potensi risiko jangka menengah yang dapat memengaruhi stabilitas sistem ketahanan pangan dan peternakan daerah.

2.3.1. Dinamika Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Regional

Stabilitas pasokan dan harga pangan strategis masih menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan. Struktur produksi pangan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan karakteristik agroekosistem yang berbeda menyebabkan ketergantungan antar wilayah cukup tinggi.

Gangguan produksi pada satu wilayah berpotensi memicu tekanan harga di wilayah lain.

Di sisi lain, komoditas pangan strategis memiliki kontribusi dominan terhadap pembentukan inflasi daerah. Oleh karena itu, stabilisasi pasokan dan harga tidak semata-mata isu sektoral, melainkan juga isu makroekonomi daerah.

Dalam konteks kewenangan provinsi, tantangan utamanya adalah:

- Meningkatkan efektivitas intervensi distribusi lintas kabupaten/kota;
- Memperkuat cadangan pangan pemerintah provinsi sebagai instrumen stabilisasi;
- Mengintegrasikan data harga dan pasokan secara real time untuk mendukung kebijakan responsif;
- Memperkuat koordinasi dengan TPID dan perangkat daerah terkait.

Keterbatasan integrasi sistem informasi dan masih bersifat pendekatan reaktif menjadi tantangan yang harus diatasi pada perencanaan Tahun 2027.

2.3.2. Kerentanan Sistem Pangan terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Produksi

Perubahan iklim berdampak pada pola tanam, produktivitas lahan, serta stabilitas pasokan bahan baku pakan ternak. Variabilitas curah hujan dan kejadian cuaca ekstrem meningkatkan risiko gagal panen maupun gangguan produksi peternakan.

Kerentanan ini bersifat sistemik karena memengaruhi rantai pasok secara menyeluruh. Dalam posisi provinsi sebagai penguat sistem regional, tantangan yang dihadapi meliputi:

- Penyusunan kebijakan berbasis peta kerentanan wilayah;
- Penguatan cadangan pangan sebagai buffer stock;
- Integrasi perencanaan ketahanan pangan dengan strategi adaptasi perubahan iklim daerah;
- Penguatan early warning system berbasis data produksi dan distribusi.

Tanpa pendekatan mitigasi risiko yang terstruktur, sistem ketahanan pangan daerah akan cenderung rentan terhadap shock eksternal.

2.3.3. Produktivitas dan Daya Saing Subsektor Peternakan

Struktur usaha peternakan di Sumatera Selatan masih didominasi oleh peternakan rakyat berskala kecil dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan

manajemen usaha. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas per satuan ternak serta tingginya biaya produksi.

Selain itu, ketergantungan terhadap pasokan bibit dan pakan dari luar daerah meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas harga daging dan telur sebagai komoditas strategis.

Sebagai kewenangan provinsi yang mencakup pembinaan lintas kabupaten/kota dan penguatan kapasitas teknis, tantangan strategis meliputi:

- Peningkatan efisiensi usaha ternak melalui pembinaan teknologi dan manajemen;
- Penguatan kemandirian pakan berbasis sumber daya lokal;
- Peningkatan kapasitas SDM peternak dan kelembagaan usaha;
- Integrasi pengembangan peternakan dengan sistem logistik regional.

Jika tidak dilakukan intervensi berbasis sistem, subsektor peternakan akan sulit menjadi penopang utama ketahanan pangan protein hewani daerah.

2.3.4. Risiko Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Mobilitas ternak lintas wilayah meningkatkan potensi penyebaran penyakit hewan menular strategis. Risiko ini bersifat

lintas administratif sehingga membutuhkan peran provinsi sebagai koordinator dan pengawas lalu lintas ternak antar kabupaten/kota.

Tantangan utama meliputi:

- Penguatan sistem surveilans epidemiologi;
- Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan;
- Penguatan sistem respon cepat terhadap potensi wabah;
- Pengawasan keamanan pangan asal hewan secara terpadu.

Isu ini tidak hanya berdampak pada aspek produksi, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi peternak.

2.3.5. Disparitas Layanan dan Integrasi Data

Kualitas layanan ketahanan pangan dan kesehatan hewan antar wilayah belum sepenuhnya merata. Keterbatasan sarana prasarana dan SDM teknis pada beberapa wilayah menyebabkan kesenjangan layanan.

Selain itu, integrasi data pangan dan peternakan masih belum optimal. Data produksi, distribusi, harga, dan kesehatan hewan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang komprehensif. Hal ini berimplikasi pada keterlambatan respon kebijakan serta kurang optimalnya perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).

2.3.6. Tantangan Fiskal dan Efektivitas Belanja

Meskipun realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 96,33% dengan capaian fisik 100%, tantangan utama ke depan adalah meningkatkan kualitas belanja agar lebih berorientasi pada outcome strategis. Keterbatasan fiskal daerah menuntut prioritas program dengan daya ungkit tinggi terhadap stabilitas pangan dan peningkatan produktivitas peternakan.

Perencanaan Tahun 2027 harus mengarah pada:

- Penguatan belanja produktif;
- Penajaman prioritas berbasis risiko;
- Pengurangan belanja yang kurang berdampak langsung terhadap indikator strategis;
- Optimalisasi kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 menunjukkan bahwa tantangan ke depan bersifat sistemik dan lintas wilayah. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan tidak dapat lagi bersifat sektoral dan administratif semata, melainkan harus berbasis orkestrasi kebijakan regional, manajemen risiko, serta penguatan sistem ketahanan pangan dan peternakan secara menyeluruh.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dilakukan untuk memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Proses ini bertujuan menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan serta sub urusan peternakan dan kesehatan hewan, posisi Dinas bersifat strategis dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya pada aspek:

- Pengendalian inflasi daerah;
- Penguatan ketahanan pangan regional;
- Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- Perlindungan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan;
- Pengurangan kerentanan wilayah terhadap risiko pangan.

Berdasarkan telaahan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027, terdapat keterkaitan langsung antara prioritas daerah dan program perangkat daerah, yaitu:

1. Prioritas Stabilitas Ekonomi Daerah

→ Didukung oleh program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan cadangan pangan, serta pengendalian penyakit hewan yang berpotensi mengganggu produksi.

2. Prioritas Penguatan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian

→ Didukung oleh program peningkatan produktivitas peternakan, pembinaan kelompok ternak, serta penguatan sistem logistik pangan regional.

3. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

→ Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memastikan tata kelola anggaran dan kinerja berjalan efektif dan akuntabel.

Secara umum, program dan kegiatan Dinas telah selaras dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, baik dari sisi substansi maupun indikator kinerja.

Dalam proses review, terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian, antara lain:

- Penajaman indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome makro (misalnya kontribusi terhadap inflasi pangan);
- Penguatan intervensi lintas kabupaten/kota sesuai kewenangan provinsi;

- Penyesuaian pagu indikatif dengan kemampuan fiskal daerah;
- Penguatan pendekatan manajemen risiko dalam program teknis.

Penyesuaian tersebut dilakukan agar Renja Tahun 2027 tidak hanya menjadi turunan administratif RKPD, tetapi benar-benar menjadi instrumen operasional untuk mencapai target pembangunan daerah.

Renja Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.3, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam konteks ini, peran provinsi lebih difokuskan pada:

- Penguatan sistem stabilisasi pangan regional;
- Koordinasi dan fasilitasi lintas kabupaten/kota;
- Pengawasan dan pengendalian penyakit hewan lintas wilayah;
- Penyediaan layanan teknis yang bersifat regional.

Dengan demikian, Renja Tahun 2027 telah diselaraskan secara substansial dengan Rancangan Awal RKPD, baik dari sisi prioritas, indikator, maupun arah kebijakan pembangunan.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		29.926.480.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		35.032.738.000	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		950.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		350.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	200.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	150.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.967.376.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31.641.034.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sumsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 orang/bulan	23.792.376.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sumsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	306 Org/Bln	31.481.034.000	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	175.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	160.000.000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		450.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.000.000	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	243 Paket	300.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Sumsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Sumsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.030.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		537.000.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	45.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	7.000.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	300.000.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		435.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.000.000	
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
17	Pengadaan Mebel	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	235.000.000	Pengadaan Mebel	Prov. Sumsel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
19	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah		1.894.104.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah		1.721.104.000	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	17.000.000	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	700.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	530.000.000	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.174.104.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1.174.104.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		633.600.000	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sumsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	650.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Sumsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	283.600.000	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	
B	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prov. Sumsel	Persentase kenaikan SDM Peningkatan Kualitas Pangan		300.000.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prov. Sumsel	Persentase kenaikan SDM Peningkatan Kualitas Pangan		-	
IX	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		300.000.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		-	
26	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	70 unit	300.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia		-	
C	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prov. Sumsel	Stok Cadangan Pangan Daerah		2.450.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prov. Sumsel	Stok Cadangan Pangan Daerah		1.486.645.000	
X	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prov. Sumsel	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan		650.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prov. Sumsel	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan		370.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Prov. Sumsel	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	4 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Prov. Sumsel	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis		-	
28	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	150.000.000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Lap	150.000.000	
29	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5 Unit	200.000.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	100.000.000	
30	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Prov. Sumsel	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	200.000.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Prov. Sumsel	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	120.000.000	
XI	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan		350.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan		200.000.000	
31	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	18 Ton	350.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	15 Ton	200.000.000	
XII	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi		1.450.000.000	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi		916.645.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov. Sumsel	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Dok	350.000.000	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov. Sumsel	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dok	250.000.000	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prov. Sumsel	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Lap	950.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prov. Sumsel	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Lap	600.000.000	
34	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Lap	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Lap	66.645.000	
D	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prov. Sumsel	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan		1.016.184.351	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prov. Sumsel	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan		375.000.000	
XIII	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang tersusun		150.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang tersusun		75.000.000	
35	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dok	150.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dok	75.000.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		866.184.351	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		300.000.000	
36	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8 Dok	866.184.351	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dok	300.000.000	
E	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prov. Sumsel	Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi/terregistrasi		825.000.000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prov. Sumsel	Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi/terregistrasi		315.000.000	
XV	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		825.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		315.000.000	
37	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Prov. Sumsel	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	45 Sertifikat	350.000.000	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Prov. Sumsel	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	25 Sertifikat	150.000.000	
38	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	55 Dok	175.000.000	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dok	75.000.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Prov. Sumsel	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Dok	300.000.000	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Prov. Sumsel	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dok	90.000.000	
F	Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase kenaikan produksi daging, susu, dan telur		2.033.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase kenaikan produksi daging, susu, dan telur		1.090.000.000	
XVI	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		400.000.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		260.000.000	
40	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dok	150.000.000	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dok	60.000.000	
41	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Lap	250.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Lap	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XVII	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		983.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		500.000.000	
42	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Prov. Sumsel	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Lap	783.000.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Prov. Sumsel	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Lap	400.000.000	
43	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Prov. Sumsel	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dok	200.000.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Prov. Sumsel	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dok	100.000.000	
XVIII	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Prov. Sumsel	Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		50.000.000	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Prov. Sumsel	Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		-	
44	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Prov. Sumsel	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Lap	50.000.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Prov. Sumsel	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		-	
XIX	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov. Sumsel	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		600.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov. Sumsel	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		330.000.000	
45	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov. Sumsel	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	-	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov. Sumsel	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain		-	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov. Sumsel	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	4000 Ekor	600.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov. Sumsel	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3000 Ekor	330.000.000	
G	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Kenaikan Produksi Daging, Susu, Telur		1.540.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Kenaikan Produksi Daging, Susu, Telur		770.000.000	
XX	Penataan Prasarana Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Penataan Prasarana Pertanian		1.290.000.000	Penataan Prasarana Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Penataan Prasarana Pertanian		650.000.000	
47	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Lap	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		-	
48	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Prov. Sumsel	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1.000.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Prov. Sumsel	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	550.000.000	
49	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Prov. Sumsel	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit	190.000.000	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Prov. Sumsel	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXI	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		250.000.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		120.000.000	
50	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Prov. Sumsel	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Lap	250.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Prov. Sumsel	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Lap	120.000.000	
H	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov. Sumsel	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan		1.445.000.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov. Sumsel	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan		750.000.000	
XXII	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		710.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		400.000.000	
51	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Prov. Sumsel	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Lap	400.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Prov. Sumsel	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Lap	200.000.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Prov. Sumsel	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Unit	310.000.000	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Prov. Sumsel	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Unit	200.000.000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang terawasi		75.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang terawasi		-	
53	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Lap	75.000.000	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Prov. Sumsel	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya		-	
XXIV	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Prov. Sumsel	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		325.000.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Prov. Sumsel	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		200.000.000	
54	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Prov. Sumsel	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	1 Dok	325.000.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Prov. Sumsel	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	1 Dok	200.000.000	
XXV	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov. Sumsel	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		250.000.000	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov. Sumsel	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		150.000.000	

Rencana Kerja DKPP Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Prov. Sumsel	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	15 Dok	250.000.000	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Prov. Sumsel	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	15 Dok	150.000.000	
XXVI	Kesejahteraan Hewan	Prov. Sumsel	Persentase Kesejahteraan Hewan		85.000.000	Kesejahteraan Hewan	Prov. Sumsel	Persentase Kesejahteraan Hewan		-	
56	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Prov. Sumsel	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	2 Sertifikat	85.000.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Prov. Sumsel	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		-	
I	Program Penyuluhan Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Kenaikan Lembaga Kelompok Masyarakat di tingkat petani dan peternak yang kompeten		7.100.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Kenaikan Lembaga Kelompok Masyarakat di tingkat petani dan peternak yang kompeten		6.052.922.661	
XXVII	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		5.300.000.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Prov. Sumsel	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		4.932.922.661	
57	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	340 Kelompok	5.300.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	340 Kelompok	4.932.922.661	
XVIII	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Prov. Sumsel	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		1.800.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Prov. Sumsel	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		1.120.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Prov. Sumsel	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	17 Unit	1.800.000.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Prov. Sumsel	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	17 Unit	1.120.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang provinsi serta penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan sektor ketahanan pangan dan peternakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan Tahun 2027 responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kewenangan provinsi.

Sebagai perangkat daerah dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap usulan yang masuk dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan kewenangan provinsi;
2. Keterkaitan dengan isu strategis daerah;
3. Dampak terhadap indikator kinerja Renstra dan RKPD;
4. Ketersediaan pagu indikatif dan prioritas fiskal;
5. Skala manfaat lintas wilayah.

Berdasarkan hasil inventarisasi usulan, mayoritas aspirasi masyarakat pada sektor ketahanan pangan dan peternakan mencakup:

- Bantuan sarana dan prasarana produksi peternakan (bibit, pakan, kandang);

- Bantuan alat pengolahan hasil ternak;
- Penguatan cadangan pangan di tingkat desa/kelompok;
- Peningkatan kapasitas kelompok tani ternak;
- Permintaan layanan kesehatan hewan dan vaksinasi.

Sebagian besar usulan bersifat operasional dan langsung menyentuh kelompok masyarakat. Namun demikian, tidak seluruh usulan dapat diakomodasi dalam Renja Tahun 2027, mengingat sebagian di antaranya merupakan kewenangan kabupaten/kota, terutama pada aspek produksi primer dan pembinaan teknis langsung kepada peternak skala kecil.

Berdasarkan analisis kewenangan sesuai pembagian urusan pemerintahan, usulan yang dapat diakomodasi pada level provinsi adalah yang memiliki karakter:

- Bersifat lintas kabupaten/kota;
- Mendukung stabilisasi sistem regional;
- Berkaitan dengan pengendalian penyakit hewan menular strategis;
- Mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- Berorientasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan skala regional.

Sementara itu, usulan yang bersifat individual atau spesifik lokasi pada satu kabupaten/kota diarahkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Secara umum, tingkat keterakomodasian usulan masyarakat dalam Renja Tahun 2027 sangat dipengaruhi oleh:

- Kemampuan fiskal daerah;
- Prioritas pembangunan provinsi;
- Kesesuaian dengan indikator kinerja strategis;
- Sinkronisasi dengan program pusat.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah mengintegrasikan usulan masyarakat yang relevan ke dalam kerangka program strategis, sehingga tidak berdiri sebagai kegiatan ad hoc, melainkan menjadi bagian dari intervensi sistemik.

Penelaahan usulan masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat masih berfokus pada dukungan produksi dan peningkatan kapasitas usaha. Oleh karena itu, Renja Tahun 2027 diarahkan pada:

- Penguatan peran provinsi sebagai fasilitator dan penguat sistem regional;
- Integrasi usulan masyarakat dalam program yang memiliki daya ungkit luas;
- Penajaman prioritas berdasarkan dampak terhadap indikator strategis ketahanan pangan dan peternakan;

- Penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk memastikan kesinambungan intervensi.

Dengan demikian, proses perencanaan Tahun 2027 tetap menjaga keseimbangan antara pendekatan partisipatif dan prinsip efektivitas pembangunan daerah.

Rancangan awal Renja DKPP Tahun 2027 belum memuat usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi kabupaten/kota dan provinsi. ataupun perangkat daerah.

Usulan program/kegiatan pemangku kepentingan pada DKPP Tahun 2027 diperoleh melalui Proses Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah/Musrenbang RKPD dengan memperhatikan masukan para pemangku kepentingan pembangunan sebagai bahan penyempurnaan Renja Tahun 2027.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memiliki konsistensi vertikal dengan arah pembangunan nasional periode 2025–2029. Sinkronisasi ini penting mengingat urusan ketahanan pangan dan peternakan merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Arah kebijakan nasional Tahun 2026 berada dalam kerangka transformasi ekonomi dan penguatan ketahanan nasional berbasis kedaulatan pangan, hilirisasi sektor pertanian, stabilitas harga, serta penguatan sistem produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam dokumen perencanaan nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2025–2029.

Pada periode ini, ketahanan pangan tidak lagi diposisikan semata sebagai isu sektoral, tetapi sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional.

Kebijakan nasional Tahun 2026 pada sektor pangan difokuskan pada:

1. Penguatan kedaulatan dan kemandirian pangan;
2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis;
3. Penguatan cadangan pangan pemerintah;
4. Transformasi sistem pangan berbasis digitalisasi dan data;
5. Pengurangan ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.

Dalam konteks tersebut, peran daerah khususnya provinsi menjadi krusial dalam memperkuat stabilitas regional sebagai bagian dari sistem pangan nasional. Provinsi berfungsi sebagai simpul koordinasi antar kabupaten/kota dalam menjaga keseimbangan pasokan dan distribusi, serta sebagai buffer dalam pengendalian risiko harga.

Renja Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk memperkuat fungsi stabilisasi regional melalui pengelolaan cadangan pangan daerah, fasilitasi distribusi lintas wilayah, serta penguatan sistem informasi harga dan pasokan.

Pada Tahun 2026, pengendalian inflasi nasional tetap menjadi prioritas pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi. Komoditas pangan

bergejolak (volatile food) masih menjadi komponen utama penyumbang inflasi.

Strategi nasional pengendalian inflasi tetap menekankan pendekatan 4K:

- Keterjangkauan harga
- Ketersediaan pasokan
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi efektif

Dalam kerangka ini, kontribusi pemerintah provinsi sangat strategis karena:

- Melakukan koordinasi pengendalian inflasi lintas kabupaten/kota;
- Memfasilitasi distribusi antar wilayah untuk mengurangi disparitas harga;
- Mengoptimalkan cadangan pangan sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek;
- Mengendalikan risiko penyakit hewan yang berpotensi menekan produksi dan menaikkan harga protein hewani.

Dengan demikian, program stabilisasi pangan dalam Renja Tahun 2026 secara langsung mendukung agenda pengendalian inflasi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Sementara, kebijakan nasional subsektor peternakan diarahkan pada:

1. Peningkatan produksi daging dan telur untuk mendukung ketahanan protein hewani;
2. Penguatan kemandirian pakan dan bibit ternak;
3. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
4. Penguatan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan konsumen;
5. Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk peternakan.

Fokus ini menunjukkan bahwa stabilitas produksi peternakan memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan dan inflasi. Wabah penyakit hewan atau gangguan produksi dapat menyebabkan lonjakan harga komoditas protein hewani yang berdampak luas pada ekonomi rumah tangga.

Dalam kerangka kewenangan provinsi, penguatan sistem surveilans epidemiologi, pengawasan lalu lintas ternak lintas kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan menjadi kontribusi strategis daerah terhadap agenda nasional Tahun 2026.

Berdasarkan telaahan terhadap arah kebijakan nasional Tahun 2026, maka perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada:

- Penguatan stabilisasi pasokan dan harga pangan regional;
- Peningkatan efektivitas cadangan pangan daerah sebagai instrumen mitigasi risiko;

- Penguatan sistem informasi pangan berbasis digital;
- Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- Penguatan pengendalian penyakit hewan lintas wilayah;
- Peningkatan kualitas tata kelola berbasis outcome dan manajemen risiko.

Dengan pendekatan tersebut, Renja Tahun 2026 tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung stabilitas pangan dan ekonomi nasional melalui penguatan sistem ketahanan pangan dan peternakan di tingkat regional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2026 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan yang merupakan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2025-2029. Tujuan ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan sistem pangan daerah yang mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas konsumsi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Sasaran ini menekankan pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta penguatan sistem ketahanan pangan yang mampu menghadapi gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Diversifikasi pangan tidak hanya dimaknai sebagai variasi konsumsi, tetapi juga sebagai strategi pengurangan ketergantungan pada komoditas tertentu, peningkatan konsumsi protein hewani, serta pemanfaatan potensi pangan lokal. Untuk indikator dari sasaran ini adalah Skor Pola Pangan Harapan dan Ketersediaan Energi dan Protein.
2. Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah, Sasaran ini merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada saat terjadi gangguan produksi, bencana alam, atau gejolak distribusi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menjadi alat intervensi langsung pemerintah provinsi untuk menjaga keseimbangan sistem pangan regional dan mendukung kebijakan stabilisasi nasional. Indikator sasaran ini adalah Persentase Cadangan Pangan.
3. Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan, Sasaran ini berorientasi pada kemampuan pemerintah provinsi dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani wilayah atau kelompok

masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, baik yang bersifat kronis maupun transien. Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.

4. Meningkatnya Kesejahteraan Peternak, Sasaran ini menekankan pada peningkatan pendapatan dan kapasitas usaha peternak sebagai pelaku utama subsektor peternakan, yang sekaligus menjadi bagian integral dari sistem ketahanan pangan daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Kesejahteraan peternak dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup: Meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha ternak; Meningkatnya akses terhadap sarana produksi (bibit, pakan, kesehatan hewan); Terkendalinya risiko usaha akibat penyakit hewan dan fluktuasi harga; dan Meningkatnya posisi tawar peternak dalam rantai pasok. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai Tukar Petani Ternak (NTPT).
5. Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan, Sasaran ini diarahkan pada peningkatan volume dan produktivitas komoditas peternakan strategis sebagai bagian dari penguatan dimensi ketersediaan dalam sistem ketahanan pangan daerah. Produksi komoditas peternakan yang dimaksud mencakup komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam

ras, serta komoditas unggulan daerah lainnya yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Indikator dari sasaran ini adalah Jumlah Produksi Daging dan Telur.

6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Sasaran ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan “Meningkatnya Ketahanan Pangan”. Sasaran ini menjadi fondasi keberhasilan seluruh sasaran substantif (1–5), karena tanpa tata kelola yang baik, intervensi teknis di bidang ketahanan pangan dan peternakan tidak akan optimal. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, akuntabilitas kinerja menjadi prinsip utama dalam penyusunan Renja, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi capaian tahunan. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dari Tujuan dan sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Skor Pola Pangan Harapan dengan target 94,7 poin;

- Ketersediaan Energi 2.400 Kkal/Kap/Hari dan Protein 63 Gram/Kap/Hari;
- Persentase Cadangan Pangan sebesar 54%;
- Persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 1%;
- Nilai tukar petani ternak sebesar 103,80 poin;
- Jumlah produksi daging sebesar 193.918 Ton dan jumlah produksi telur sebesar 287.714 ton;
- Nilai SAKIP dengan predikat A.

Dari indikator tersebut akan mengintervensi dan mendukung Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu:

1. Indeks Ketahanan Pangan sebesar 82,08 poin; dan
2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) sebesar 4,88 poin.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran Renja, dengan pendekatan berbasis kinerja (performance based budgeting) serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional.

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan prinsip:

1. Konsistensi antara Renstra, RKPD, dan Renja;

2. Kesesuaian dengan kewenangan provinsi;
3. Fokus pada pencapaian outcome;
4. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
5. Dukungan terhadap pengendalian inflasi pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Adapun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 ini diusulkan 11 Program 29 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.613.059.700,- yang sesuai dengan pagu anggaran Tahun 2026 dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1. (Tabel T-C.33.)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100%	29.926.480.000	APBD Prov	-	100%	37.038.059.700
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100%	950.000.000	APBD Prov	-	100%	525.000.000
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	4 Dok	500.000.000	APBD Prov	-	3 Dok	225.000.000
2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Sumsel	6 Lap	150.000.000	APBD Prov	-	1 Dok	15.000.000
2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-					-	1 Dok	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-	6 Lap	75.000.000
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	2 Lap	300.000.000	APBD Prov	-	2 Lap	175.000.000
2.09.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					-	1 Data	12.500.000
2.09.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					-	1 Dok	12.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100%	23.967.376.000	APBD Prov dan DAU	-	100%	31.277.639.700
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sumsel	115 Orang/ bulan	23.792.376.000	APBD Prov dan DAU	-	221 Orang/ bulan	31.077.639.700
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Sumsel	1 Dok	175.000.000	APBD Prov	-	1 Dok	200.000.000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100%	450.000.000	APBD Prov	-	100%	100.000.000
2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Sumsel	243 Paket	300.000.000	APBD Prov	-		
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Sumsel	20 orang	150.000.000	APBD Prov	-	20 orang	100.000.000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100%	1.030.000.000	APBD Prov	-	100%	745.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	8 Paket	50.000.000	APBD Prov	-	8 Paket	75.000.000
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	34 Paket	150.000.000	APBD Prov	-	34 Paket	75.000.000
2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov. Sumsel	19 Paket	45.000.000	APBD Prov	-	19 Paket	50.000.000
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	20 Paket	75.000.000	APBD Prov	-	20 Paket	75.000.000
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Sumsel	2 Paket	100.000.000	APBD Prov	-	2 Paket	75.000.000
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Prov. Sumsel	5 Dok	10.000.000	APBD Prov	-	5 Dok	15.000.000
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sumsel	145 Laporan	600.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	330.000.000
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan					-	1 Dok	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Sumsel	100%	450.000.000	APBD Prov	-	100%	450.000.000
2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	10 Unit	200.000.000
2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov. Sumsel	3 Paket	235.000.000	APBD Prov	-	3 Paket	75.000.000
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Sumsel	10 Unit	200.000.000	APBD Prov	-	10 Unit	175.000.000
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Prov. Sumsel	100%	1.894.104.000	APBD Prov	-	100%	3.130.420.000
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Sumsel	1 Laporan	20.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	25.000.000
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Prov. Sumsel	4 Laporan	700.000.000	APBD Prov	-	4 Laporan	600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	2 Laporan	1.174.104.000	APBD Prov	-	2 Laporan	2.505.420.000
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sumsel	100%	1.200.000.000	APBD Prov	-	100%	810.000.000
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Sumsel	33 Unit	650.000.000	APBD Prov	-	33 Unit	410.000.000
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Sumsel	2 Unit	200.000.000	APBD Prov	-	2 Unit	100.000.000
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov. Sumsel	5 Unit	350.000.000	APBD Prov	-	5 Unit	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Prov Sumsel	52%	300.000.000	APBD Prov	-	54%	75.000.000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Prov Sumsel	100%	300.000.000	APBD Prov	-	100%	75.000.000
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Prov Sumsel	70 Unit	300.000.000	APBD Prov	-	8 Unit	75.000.000
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Prov Sumsel	94,4	2.450.000.000	APBD Prov	-	94,7	3.800.000.000
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan	Prov Sumsel	100%	650.000.000	APBD Prov	-	100%	1.225.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan							
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					-	1 Laporan	75.000.000
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					-	1 Laporan	75.000.000
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					-	1 Dokumen	500.000.000
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya local					-	1 Laporan	100.000.000
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Prov Sumsel /Kab/ Kota	4 Laporan	150.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	100.000.000
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prov Sumsel	1 Laporan	150.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	225.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Konsumen di Provinsi	Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	/Kab/ Kota						
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	200.000.000	APBD Prov	-	1 Dok	150.000.000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Prov Sumsel	100%	350.000.000	APBD Prov	-	100%	925.000.000
2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					-	1 Dokumen	100.000.000
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					-	31,5 Ton	75000000
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov Sumsel	18 Ton	350.000.000	APBD Prov	-	31,5 Ton	750.000.000
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Persentase Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang terlaksana					-	100%	100.000.000
2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga					-	1 Laporan	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Minimum Pangan Pokok Lokal	Minimum Pangan Pokok Lokal							
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Prov Sumsel	100%	1.450.000.000	APBD Prov	-	100%	1.550.000.000
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov Sumsel /Kab/ Kota	8 Dokumen	350.000.000	APBD Prov	-	1 Dokumen	300.000.000
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Laporan	950.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	1.000.000.000
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun					-	1 Laporan	100.000.000
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian	Prov Sumsel	1 Laporan	150.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pola Pangan Harapan Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	/Kab/ Kota						
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Prov Sumsel	1%	1.016.184.351	APBD Prov	-	1%	1.200.000.000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang tersusun	Prov Sumsel	1 Dokumen	150.000.000	APBD Prov			
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dokumen	150.000.000	APBD Prov			
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel	100%	866.184.351	APBD Prov	-	100%	1.200.000.000
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah	Prov Sumsel /Kab/ Kota	8 Dokumen	866.184.351	APBD Prov	-	1 Dokumen	700.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					-	1 Dokumen	150.000.000
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi					-	12 Laporan	150.000.000
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi					-	1 Dokumen	200.000.000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Prov Sumsel	100%	825.000.000	APBD Prov	-	100%	740.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov Sumsel	100%	825.000.000	APBD Prov	-	100%	740.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	45 Sertifikat	350.000.000	APBD Prov	-	45 Sertifikat	300.000.000
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	55 Dok	175.000.000				
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	3 Dokumen	300.000.000	APBD Prov	-	3 Dokumen	200.000.000
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					-	3 Dokumen	90.000.000
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					-	3 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian	- Jumlah Produksi Daging	Prov Sumsel	184.684 Ton	2.033.000.000	APBD Prov	-	193.918 Ton	2.935.000.000
		- Jumlah Produksi Telur		274.013 Ton				287.714 Ton	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel	100%	400.000.000	APBD Prov	-	100%	1.310.000.000
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dokumen	150.000.000	APBD Prov	-	3 Dokumen	320.000.000
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Laporan	250.000.000	APBD Prov	-	2 Dokumen	940.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas					-	10 Orang	50.000.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel	100%	983.000.000	APBD Prov	-	100%	1.075.000.000
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	783.000.000	APBD Prov	-	1 Lap	925.000.000
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	200.000.000	APBD Prov	-	1 Dok	150.000.000
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat	Persentase Pengawasan	Prov Sumsel	100%	50.000.000	APBD Prov	-	100%	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hewan di Tingkat Distributor	Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang terlaksana							
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Laporan	50.000.000	APBD Prov	-	1 Laporan	50.000.000
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov Sumsel	100%	600.000.000	APBD Prov	-	100%	500.000.000
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Prov Sumsel /Kab/ Kota	4.000 Ekor	600.000.000	APBD Prov	-	4.000 Ekor	500.000.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Jumlah Produksi Daging - Jumlah Produksi Telur	Prov Sumsel	184.684 Ton 274.013 Ton	1.540.000.000	APBD Prov		193.918 Ton 287.714 Ton	700.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian	Prov Sumsel	100%	1.290.000.000	APBD Prov		100%	400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	100.000.000	APBD Prov		1 Lap	100.000.000
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Unit	1.000.000.000				
3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Prov Sumsel	1 Unit	190.000.000	APBD Prov		1 Unit	300.000.000
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prov Sumsel	100%	250.000.000	APBD Prov		100%	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Laporan	250.000.000	APBD Prov		1 Laporan	250.000.000
3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						1 Laporan	50.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis - Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Prov Sumsel	100% 100%	1.445.000.000	APBD Prov		100% 100%	2.475.000.000
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Prov Sumsel	100%	710.000.000	APBD Prov		100%	1.075.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Prov Sumsel /Kab/ Kota	17 Laporan	400.000.000	APBD Prov		17 Laporan	375.000.000
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Laporan	310.000.000	APBD Prov		1 Laporan	300.000.000
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						17 Laporan	200.000.000
3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						100 Kasus	200.000.000
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Persentase Pengawasan Pemasukan dan	Prov Sumsel	100%	75.000.000	APBD Prov		100%	175.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang terlaksana							
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Prov Sumsel /Kab/ Kota	2 Laporan	75.000.000	APBD Prov		2 Laporan	75.000.000
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan						10 Laporan	50.000.000
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM						1 Laporan	50.000.000
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan	Prov Sumsel	100%	325.000.000	APBD Prov		100%	825.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha Produk Hewan							
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi						1 Unit	50.000.000
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner						10 Laporan	50.000.000
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov Sumsel	1 Dok	325.000.000	APBD Prov		1 Dok	350.000.000
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan						20 Unit Usaha	75.000.000
3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan						20 Unit Usaha	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persyaratan higiene sanitasi							
3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik				APBD Prov		30 Unit Usaha	100.000.000
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan				APBD Prov		100 Orang	50.000.000
3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan				APBD Prov		2 Produk	50.000.000
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov Sumsel	100%	250.000.000	APBD Prov		100%	250.000.000
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan	Prov Sumsel	15 Dokumen	250.000.000	APBD Prov		20 Dokumen	200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	/Kab/ Kota						
3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi						5 Orang	50.000.000
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Persentase Kesejahteraan Hewan yang terlaksana	Prov Sumsel	100%	85.000.000	APBD Prov		100%	150.000.000
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani						2 Kasus	50.000.000
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Prov Sumsel /Kab/ Kota	2 Sertifikasi	85.000.000	APBD Prov		20 Sertifikasi	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pternakan)						100%	50.000.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi yang terlaksana						100%	50.000.000
3.27.05.1.01.0006	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan						1 Laporan	50.000.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan						100%	50.000.000
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan yang terlaksana						100%	50.000.000
3.27.06.1.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi						10 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Prov Sumsel	100%	7.100.000.000	APBD Prov		100%	5.550.000.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Prov Sumsel	100%	5.300.000.000	APBD Prov		-	5.050.000.000
73.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	340 Kelompok	5.300.000.000	APBD Prov		0 Kelompok	5.050.000.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Prov Sumsel	100%	500.000.000	APBD Prov		100%	500.000.000
3.27.07.1.03.0008	Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendapatkan pembinaan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	17 Unit	1.800.000.000	APBD Prov		17 Unit	500.000.000
Jumlah					46.635.664.351				54.613.059.700

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029 yang telah dirumuskan dalam BAB III. Rencana kerja ini disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, terukur, serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional Tahun 2026.

Penyusunan rencana kerja dilakukan sesuai mekanisme perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan memperhatikan prinsip:

1. Konsistensi antara Renstra, RKPD, dan Renja;
2. Kesesuaian dengan kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Penganggaran berbasis *outcome*;
4. Efisiensi dan efektivitas belanja;
5. Dukungan terhadap stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Rencana kerja Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran perangkat daerah melalui pelaksanaan program teknis dan program penunjang.

Rencana Kerja Tahun 2026 terdiri dari 11 Program 29 Kegiatan dan 85 Sub Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.613.059.700,-. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah;
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, terdiri dari:

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi:

- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan:

- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis;
 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi;
 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal.
4. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi:
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi.

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari:

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi:

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi;
- Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi.

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
- Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

F. Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian, terdiri dari:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner.
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi:

- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan.
3. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor:
- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain:
- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
- G. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari:
1. Penataan Prasarana Pertanian:
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya;
 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan.
2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
- Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.

H. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
- Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan;
- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan.

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi:

- Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- Pengawasan Peredaran Produk Hewan;

- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM).

3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan:

- Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;
- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan;
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan;
- Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan;
- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan;
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan.

4. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner:

- Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM);
- Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan.

5. Kesejahteraan Hewan:

- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya;
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

I. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi:
 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan.

J. Program Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari:

1. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, SubDistributor) Obat Hewan:
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.

K. Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:

1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian:

- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani

Berbasis Kawasan:

- Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota.

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Sumsel		35.032.738.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov Sumsel		350.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Sumsel	7 Dok	200.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov Sumsel	4 Lap	150.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov Sumsel		31.641.034.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Sumsel	306 Org/Bln	31.481.034.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov Sumsel	1 Dok	160.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov Sumsel		50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov Sumsel	10 Orang	50.000.000	APBD Prov dan DAU	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov Sumsel		537.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Paket	50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Paket	50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Paket	30.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Paket	50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov Sumsel	2 Paket	50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Dok	7.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov Sumsel	50 Lap	300.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Sumsel		100.000.000	APBD Prov	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov Sumsel	3 Paket	50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov Sumsel	2 Unit	50.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Prov Sumsel			APBD Prov	-
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Prov Sumsel		1.721.104.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov Sumsel	1 Lap	17.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Lap	530.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov Sumsel	1 Lap	1.174.104.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Sumsel		633.600.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov Sumsel	33 Unit	283.600.000	APBD Prov	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov Sumsel	2 Unit	100.000.000	APBD Prov	-
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov Sumsel	1 Unit	250.000.000	APBD Prov	-
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stok Cadangan Pangan Daerah	Prov Sumsel		1.486.645.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Prov Sumsel		370.000.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	150.000.000		
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Unit	100.000.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota		-	APBD Prov	-
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Prov Sumsel	1 Dok	120.000.000	APBD Prov	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
			/Kab/ Kota				
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Prov Sumsel		200.000.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	15 Ton	200.000.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Prov Sumsel		916.645.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.04.0001	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	250.000.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	600.000.000	APBD Prov	-
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	66.645.000	APBD Prov	-
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	Prov Sumsel		375.000.000	APBD Prov	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang tersusun	Prov Sumsel		75.000.000	APBD Prov	-
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	75.000.000	APBD Prov	-
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			300.000.000	APBD Prov	-
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	300.000.000	APBD Prov	-
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi/terregistrasi	Prov Sumsel		315.000.000	APBD Prov	-
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov Sumsel		315.000.000	APBD Prov	-
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	25 Sertifikat	150.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	75.000.000	APBD Prov	-
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	90.000.000	APBD Prov	-
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian	Persentase kenaikan produksi daging, susu, dan telur	Prov Sumsel		1.090.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel		260.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	60.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	200.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Prov Sumsel		500.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	400.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	100.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Prov Sumsel		330.000.000	APBD Prov	-
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Prov Sumsel /Kab/ Kota	3000 Ekor	330.000.000	APBD Prov	-
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Daging, Susu, Telur	Prov Sumsel		770.000.000	APBD Prov	-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian	Prov Sumsel		650.000.000	APBD Prov	-
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Unit	550.000.000	APBD Prov	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Unit	100.000.000	APBD Prov	-
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Sumsel		120.000.000	APBD Prov	-
3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	120.000.000	APBD Prov	-
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan	Prov Sumsel		750.000.000	APBD Prov	-
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Sumsel		400.000.000	APBD Prov	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Lap	200.000.000	APBD Prov	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Unit	200.000.000	APBD Prov	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Prov Sumsel		200.000.000	APBD Prov	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov Sumsel /Kab/ Kota	1 Dok	200.000.000	APBD Prov	
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prov Sumsel		150.000.000	APBD Prov	
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Prov Sumsel /Kab/ Kota	15 Dok	150.000.000		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Lembaga Kelompok Masyarakat di tingkat petani dan peternak yang kompeten	Prov Sumsel		6.052.922.661	APBD Prov	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Prov Sumsel		4.932.922.661	APBD Prov	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Prov Sumsel /Kab/ Kota	340 Kelompok	4.932.922.661	APBD Prov	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Prov Sumsel		1.120.000.000	APBD Prov	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Prov Sumsel /Kab/ Kota	17 Unit	1.120.000.000	APBD Prov	
Jumlah					45.872.305.661		

Tabel 4.2.
Rincian Komponen Belanja Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026

Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
I.	BELANJA OPERASI	37.638.584.615	
1.	Belanja Pegawai :	26.026.019.958	
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.537.279.958	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	11.503.091.040	
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	934.518.928	
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	395.220.000	
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	498.960.000	
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	342.440.000	
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	587.036.520	
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	168.132.915	
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	170.310	
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	946.918.596	
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	26.431.790	
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	79.294.404	
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	55.065.455	
b.	Belanja Pegawai Lainnya ASN	10.488.740.000	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.488.740.000	
	- - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN		
	- - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
	2) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN		
	3) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.812.540.000	
	4) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	676.200.000	
	5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	
	6) - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD		
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		
	- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan/Jasa)	-	
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD		
	2) Belanja Pegawai BOS		
	3) Belanja Pegawai BLUD		
	4) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD		
	5) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH		
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.612.564.657	
3.	Belanja Bunga		
4.	Belanja Subsidi		
5.	Belanja Hibah		
	1) Hibah Kepada.....		
	2) dst.....		
	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Bantuan Sosial Kepada.....		
	2) dst.....		
II	BELANJA MODAL	250.000.000	
a.	Belanja Modal Tanah		
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000	
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		

	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
III	BELANJA TIDAK TERDUGA		
IV	BELANJA TRANSFER		
1	Belanja Bagi Hasil		
2	Belanja Bantuan Keuangan		
TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)		37.888.584.615	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan di tingkat provinsi. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran Renstra 2025–2029 serta bagian integral dari RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Renja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya;
3. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pengendalian serta evaluasi kinerja peningkatan ketahanan pangan dan peternakan;

4. Apabila ketersediaan anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, maka prioritas pelaksanaan diarahkan pada Kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah, kegiatan yang mengintervensi Program Strategis Kepala Daerah, dan kegiatan yang mendukung Program Strategis dan Proyek Strategis Nasional.

Pelaksanaan Renja Tahun 2027 berpedoman pada kaidah sebagai berikut:

1. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
2. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar program dan kegiatan;
3. Menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja; dan
5. Mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah operasional dalam memastikan implementasi Renja berjalan efektif, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi program dan kegiatan yang memuat target, indikator, lokasi, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab;
2. Pelaksanaan koordinasi teknis secara berkelanjutan dengan pemangku kepentingan untuk menjaga keterpaduan pelaksanaan program;
3. Penguatan sistem pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara periodic;
4. Pelaksanaan reviu dan evaluasi capaian kinerja sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya; dan
5. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan kualitas layanan.

Dengan memperhatikan catatan penting, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dapat berjalan efektif, terukur, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan “Meningkatnya Ketahanan Pangan”.

Dokumen ini menjadi komitmen bersama seluruh jajaran perangkat daerah untuk melaksanakan pembangunan bidang

ketahanan pangan dan peternakan secara profesional, responsif,
dan berorientasi pada hasil.

Palembang, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196812101993031004